

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar

Mardhiyah^{1*}, Ade Saputra², Dewi Wulandari Fahrezi³, Salfen Hasri⁴, Sohiron⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara komprehensif dengan menggali secara mendalam pengalaman subjek penelitian melalui pemanfaatan sarana deskriptif. Jenis penelitian ini melibatkan penggunaan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada bahasa sebagai media komunikasi. Jenis data penelitian mengacu pada deskriptif kualitatif yang menjabarkan berupa kata-kata bukan angka. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya, langkah menganalisis data yaitu reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra, dan akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan serangkaian proses dan sistem mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan. Dua rekomendasi utama yang penulis kemukakan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu sistem akreditasi sekolah/madrasah adalah (1) kebutuhan teknologi untuk sistem akreditasi sekolah/madrasah, dan (2) pengukuran dampak atau manfaat dari sistem akreditasi yang terintegrasi TIK. Pemetaan Kebutuhan Teknologi Desain Sistem Komputerisasi Akreditasi Sekolah/Madrasah dilakukan untuk memberikan rekomendasi berupa pemetaan kebutuhan teknologi berupa sistem komputerisasi untuk menciptakan layanan prima yang sesuai dengan prinsip reformasi layanan dan undang-undang pelayanan publik. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders. Implementasi Sistem penjaminan mutu di sekolah Dasar ini yang ada bersifat formal dan ada yang bersifat informal.

Kata kunci: Implementasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sekolah dasar

History:

Received : 04 Nov 2023

Revised : 11 Nov 2023

Accepted : 21 Nov 2023

Published : 29 Dec 2023

^{1,2,3,4,5}UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*Author Correspondent: anyaflower18@gmail.com

Publishers: LPM IAIN Shaykh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Pendahuluan

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada upaya mewujudkan daya saing, pencitraan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Tolok ukur efektivitas implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian indikator-indikator mutu penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan BNSP dalam delapan (8) standar nasional pendidikan (SNP) (Gustini & Mauly, 2019)

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Tidak dipungkiri bahwa upaya strategis jangka panjang untuk mewujudkannya menuntut satu sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membangun kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) yang terkait dalam satu keterpaduan jaringan kerja tingkat nasional, regional, dan lokal (Rahminawati, 2021).

Dalam konteks pendidikan, sekolah yang bermutu dapat dilihat melalui spesifikasinya yang berarti standarisasi yang ada. Sekolah yang bermutu yaitu sekolah yang telah memenuhi

atau melebihi standar minimal, baik standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar kurikulum, dan sebagainya (Febriani et al., 2023). Lembaga pendidikan yang bermutu adalah sekolah yang mampu menghasilkan alumni atau lulusan atau peserta didik yang sesuai dengan harapan pelanggan, seperti mengisi peluang dunia kerja, memiliki sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu berkontribusi aktif terhadap kemajuan masyarakat, baik masyarakat daerah ataupun bangsa dan Negara (Saihu & Siregar, 2022). Mutu diidentikkan dengan penilaian pelanggan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mesti mengidentifikasi kebutuhan pelanggannya. Untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, lembaga pendidikan hendaknya mengetahui terlebih dahulu siapa pelanggannya (Hamidah et al., 2019). Setelah diketahui pelanggannya, maka lembaga pendidikan harus mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan. Perbedaan harapan dan kebutuhan pelanggan harus diupayakan dapat dipenuhi secara maksimal (Rahwati, 2019).

Setiap kelompok-kelompok atau setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda, lembaga pendidikan hendaknya memiliki cara agar semua harapan dan kebutuhan yang berbeda dapat terpenuhi (Sunarti, 2023). Dalam pendidikan mutu produk secara sederhana dapat dilihat dari perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti ditunjukkan dalam hasil-hasil ulangan dan ujian (Musa & Sawaluddin, 2020). Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Presepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut dianggap sebagai prestasi dan totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik (Sawaluddin, Koiy Syahbudin, Imran Rido, 2022). Lembaga satuan pendidikan harus memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) memiliki delapan standar, yang masing-masing standar tersebut membentuk serangkaian input, proses (isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian) dan output (standar kompetensi lulusan). Konsep implementasi manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah institusi pendidikan yang memposisikan dirinya sebagai institusi jasa (Darmaji et al., 2020).

Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara komprehensif dengan menggali secara mendalam pengalaman subjek penelitian melalui pemanfaatan sarana deskriptif. Jenis penelitian ini melibatkan penggunaan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada bahasa sebagai media komunikasi. Jenis data penelitian mengacu pada deskriptif kualitatif yang menjabarkan berupa kata-kata bukan angka (Suwandi, 2021). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya, langkah menganalisis data yaitu reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

Mutu pendidikan

Dalam manajemen mutu, ada dua konsep tentang mutu atau *quality*, yaitu konsep klasik dan konsep modern. Konsep klasik bersifat absolut, sementara konsep modern bersifat relatif. Dalam konsep klasik, mutu suatu produk ditentukan oleh produsen sedangkan dalam konsep modern mutu ditentukan oleh konsumen atau tergantung pada penilaian konsumen. Dalam konsep klasik ini mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga.

Adapun dalam konsep modern (relatif) mutu menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah memuaskan konsumen atau tidak. Ali menambahkan bahwa pada konsep mutu yang bersifat absolut, derajat (*degree*) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga

barang atau jasa itu serta tingginya standar atau tingginya penilaian dari lembaga yang memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian dari pelanggan yang memanfaatkan produk tersebut (Am, 2022).

Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Atas dasar kriteria ini produsen menentukan kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu, dalam rangka manajemen produksi agar menghasilkan produk yang bermutu di lembaga yang bersangkutan biasanya ada bagian atau divisi yang menjalankan fungsi pengendalian mutu (*quality control*) yang bertugas membuat penilaian (*judgment*) berdasarkan kriteria tertentu terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar, apakah termasuk katagori tidak bermutu, bermutu atau bermutu tinggi (Budi, Radiana, Tulus, 2022).

Filosofi klasik tentang mutu dewasa ini telah berubah. Perubahan itu dapat diidentifikasi dari orientasinya yang semula pada produsen telah bergeser pada pelanggan. Mutu suatu produk bukan ditentukan oleh produsen, melainkan ditentukan oleh pelanggan dengan kriteria yang digunakan adalah memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan (Sulastri, 2020). Mutu suatu produk adalah paduan sifat-sifat produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

Mutu dalam Konteks Sekolah

Praktek pendidikan dapat dianalogikan dengan industri khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa (*service*) kepada para pelanggannya. Pelanggan jasa pendidikan yang di produksi oleh sekolah terdiri dari pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyandang dana, dan pelanggan tersier yaitu pemakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. Pelanggan sekunder dan tersier, yaitu orang tua, masyarakat penyandang dana dan pemakai lulusan, bisa disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah (*stakeholders*) (Risal Sammara, 2023).

Dengan berpegang kepada konsep mutu sebagaimana dijelaskan di atas, apabila konsep modern digunakan, maka mutu sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yakni siswa dan *stakeholders*, bukan oleh produsen yaitu sekolah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan layanan atau jasa pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pelanggannya (Rahminawati, 2021).

Apakah sekolah dapat memberi layanan yang sesuai atau melebihi kepuasan para pelanggannya merupakan pertanyaan kunci dalam menilai mutu suatu sekolah. Untuk menilainya diperlukan adanya kriteria-kriteria penilaian pada masing-masing dimensi mutu. Menurut Sanusi (1990), dimensi-dimensi itu meliputi dimensi hasil belajar, dimensi mengajar, bahan kajian, dan dimensi pengelolaan. Dimensi hasil belajar dapat dipandang sebagai mutu output sedangkan dimensi pengelolaan dan mutu mengajar sebagai mutu proses, sementara dimensi bahan kajian sebagai mutu input (Amri et al., 2022). Berbagai dimensi tersebut dapat dipandang sebagai sumber-sumber mutu sekaligus sebagai fokus mutu dalam penjaminan mutu sekolah (Rahwati, 2019).

Implementasi, dan Proses Penjaminan Mutu Sekolah Dasar

Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi yang dilakukan dengan cara mengefektifkan setiap langkah yang dilaksanakan, memperhatikan setiap sumberdaya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi di evaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jika terjadi kekeliruan maka segera dilakukan perbaikan sehingga bisa dihindari terjadinya kerugian. Selain pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, perbaikan juga harus dilakukan secara

berkelanjutan (Mubarok & Apriani, 2022),(Sawaluddin, 2021), (Sawaluddin, 2018). Penerapan seperti ini dalam manajemen mutu mempunyai dampak terhadap produk yang dihasilkan, karena pencegahan kesalahan dalam memproses produksi yang dilakukan secara terus menerus dan pengawasan yang ketat (Darmaji et al., 2020).

Dalam pendidikan, logikanya sebagaimana yang diterapkan manajemen produksi seperti di atas, juga dapat diterapkan di dalam manajemen pendidikan. Oleh sebab itu penjaminan mutu ini dapat diterapkan dalam manajemen mutu pendidikan, karena merupakan suatu pemantauan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka memenuhi pencapaian mutu yang baik untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memfokuskan penilaian dan pengembangan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan(Am, 2022).

Fullan (1991) menjelaskan, fokus penilaian mengindikasikan pentingnya dukungan melalui strategi pengembangan dan pentingnya tekanan melalui proses akuntabilitas dalam perubahan maupun perbaikan sekolah secara efektif. Penilaian sekolah dalam rangka penjaminan mutu sangat penting dan fundamental sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan sekolah (manajemen berbasis sekolah). Dengan adanya akuntabilitas lokal sekolah, maka proses penilaian yang lebih memuaskan sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya standar yang telah ditetapkan dan akan terpenuhinya harapan masyarakat(Budi, Radiana, Tulus, 2022).

Penerapan penjaminan mutu ini yang ada bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga yang ada diluar organisasi yang bersifat independen secara khusus menjalankan evaluasinya agar terpenuhinya standar mutu untuk akreditasi atau sertifikasi. Penjaminan mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu (*quality circle*) dalam organisasi itu sendiri (*internal*) dengan tugas utama adalah menentukan standar mutu, sistem penilaian, dan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian atau audit tersebut(Abd. Madjid, 2018).

Dalam penentuan, *quality standart* merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam konteks penjaminan mutu formal maupun informal. Penjaminan mutu formal melalui ISO yaitu merupakan aplikasi dan prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya menentukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan untuk menjamin suatu produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, untuk mendapat sertifikasi dari badan internasional(Hully, Rahman, Ahmad Zikri, Irwan, Sawaluddin, Achmad Ghozali Syafii, 2023). Dalam rangka menuju kearah pembakuan mutu pendidikan sebagaimana yang dilakukan sertifikasi melalui ISO terhadap pendidikan, perlu ditetapkan lebih dahulu apa yang yang menjadi fokus penjaminan mutu pendidikan. Menurut *Departemen For Education and chaildrens Services* (1996), menekankan agar penjaminan mutu di fokuskan pada proses dan hasil pendidikan. Dalam upaya menerapkan model penjaminan mutu pendidikan ini maka perlu adanya komitmen yang tinggi, penilaian kebutuhan, perencanaan strategik, penyusunan rencana taktis, dan penilai kemajuan. Penerapan penjaminan mutu ini sangat penting dalam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah(Hamdi et al., 2020).

Dalam *Directorate of Quality Assurance*, ada tiga komponen sistemik dari penjaminan mutu yang dikembangkan yaitu 1) belajar dan mengajar, 2) kepemimpinan dan budaya, serta 3) pengembangan dan manajemen sekolah. Pertama, komponen belajar mengajar meliputi lingkungan belajar, proses belajar peserta didik, proses mengajar, prencanaan dan penerapan mengajar, penguasaan dan pelaporan, serta penilaian dan refleksi (Wahyuni et al., 2020).

Kedua, kepemimpinan dan budaya meliputi kepemimpinan kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya, mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar, budaya peningkatan, dan pengembangan sekolah (Rohman et al., 2015).

Ketiga, tata laksana meliputi tujuan sekolah, penetapan prioritas, perencanaan, tata laksana peningkatan yang terencana, dan tata laksana perubahan fundamental (Dan et al., 2021).

Indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu, meliputi empat hal yakni sebagai berikut.

- a. manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek kepemimpinan, perencanaan, dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya, sumber daya dan pemeliharannya dan evaluasi diri.
- b. pembelajaran yang meliputi aspek-aspek kurikulum, pengajaran, proses belajar, peserta didik dan penilaian.
- c. dukungan kepada peserta didik dan etos kerja sekolah yang meliputi aspek bimbingan, pengembangan kepribadian dan sosial peserta didik, dukungan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orang tua dan masyarakat dan iklim sekolah.
- d. prestasi belajar meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis (Sutikno, 2017).

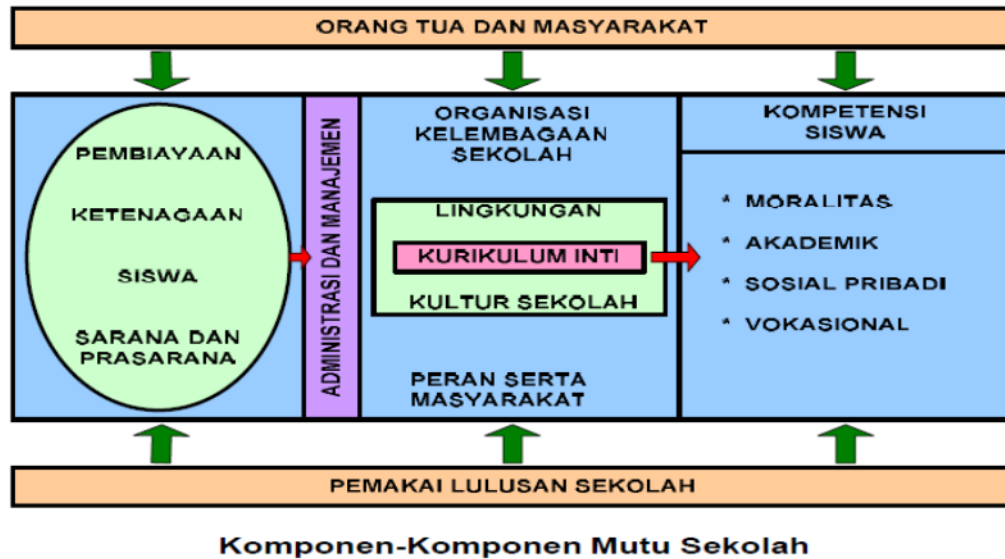
Proses mutu dilakukan tiga tingkatan yakni tingkatan sekolah, tingkatan teritorial dan tingkatan internasional. Khusus mengenai di tingkat sekolah setiap sekolah merencanakan pengembangan atas dasar tujuan kemudian melaksanakan rencana tersebut. Dalam rangka penjaminan mutu sekolah diperlukan evaluasi diri dan membuat laporan tahunan setiap tahunnya. Sekolah memiliki fungsi pendidikan yang fundamental dalam meningkatkan kemajuan pendidikan. Studi yang dilakukan oleh UNESCO (Imami & Hariyati, 2021)(Gustini & Mauliy, 2019), menyimpulkan tentang adanya empat pilar pendidikan yang pada hakekatnya merupakan salah satu kajian tentang fungsi pendidikan. Keempat pilar yang dimaksud adalah a) *learning to know*, b) *learning to do*, c) *learning to live together*, and d) *learning to be*. Hasil studi tersebut dikaitkan dengan fungsi sekolah, yaitu sekolah sebagai layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama peserta didik (Rahminawati, 2021).

Berdasarkan studi oleh UNESCO tersebut, maka fungsi sekolah adalah:

- a. Memeberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pemgetahuan atau kemampuan akademik yang di butuhkan dalam kehidupan.
- b. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan,
- c. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama ataupun bekerjasama dengan orang lain.
- d. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri. Hasil kajian di atas dijadikan sebagai landasan untuk mempersepsikan atau memahami fungsi sekolah.

Dengan kata lain fungsi sekolah adalah membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional (ekonomik), dan sosial pribadi. Kompetensi tersebut dicapai melalui layanan yang harus diberikan sekolah yakni: a) implementasi kurikulum/proses belajar mengajar, b) administrasi sekolah dan manajemen sekolah, c) layanan penciptaan lingkungan dan kultur sekolah yang kondusif, d) layanan pembinaan organisasi dan kelembagaan sekolah, dan e) kemitraan sekolah dan masyarakat (Rahwati, 2019).

Dari kelima layanan tersebut, layanan implelementasi kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan layanan pokok dari ciri sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk keberhasilan dari kelima layanan diatas, perlu mendapat dukungan yakni a) pembiayaan, b) tenaga pendidik dan kependidikan, c) sarana parasarana, d) peserta didik yang memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan. Adapun gambaran mengenai komponen-komponen mutu sekolah dapat dicermati pada bagan berikut.



Dari bagan tersebut dapat dipaparkan penjelasan bahwa:

- a. Dimensi-dimensi mutu pendidikan secara keseluruhan pada hakekatnya merupakan penjaminan agar sekolah tersebut dapat mengantarkan peserta didiknya mencapai kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
- b. Mutu lulusan sekolah ditandai oleh kompetensi yang dimiliki siswa yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
- c. Kompetensi ini dapat dicapai melalui proses yang mencakup pemberian layanan dari kurikulum dan proses belajar mengajar, lingkungan dan kultur sekolah yang kondusif, penyelenggaraan administrasi sekolah dan manajemen sekolah yang baik, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, pembinaan organisasi dan kelembagaan sekolah dengan baik serta dukungan pembiayaan yang memadai, memiliki tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pendidik, serta dipenuhinya sarana dan parasana yang cukup memadai. (Risal Sammara, 2023)

Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan penerima lulusan sekolah baik sekolah jenjang berikutnya maupun lapangan pekerjaan

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan bahwa, sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra, dan akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan serangkaian proses dan sistem mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan. Dua rekomendasi utama yang penulis kemukakan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu sistem akreditasi sekolah/madrasah adalah (1) kebutuhan teknologi untuk sistem akreditasi sekolah/madrasah, dan (2) pengukuran dampak atau manfaat dari sistem akreditasi yang terintegrasi TIK. Pemetaan Kebutuhan Teknologi Desain Sistem Komputerisasi Akreditasi Sekolah/Madrasah dilakukan untuk memberikan rekomendasi berupa pemetaan kebutuhan teknologi berupa sistem komputerisasi untuk menciptakan layanan prima yang sesuai dengan prinsip reformasi layanan dan undang-undang pelayanan publik. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen *input*, komponen proses dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stake holders*. Implementasi Sistem penjaminan

Referensi

- Abd. Madjid. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Alviana Cahyanti (ed.); 1st ed.). Samudra Biru.
- Am, S. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Spmp) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Sekolah. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(1), 30–43.
- Amri, K., Riyantini, S., & Hasri, S. (2022). Strategi Pengembangan Mutu dan Akreditasi Di Madrasah. *Sustainable*, 5(2), 172–182.
- Budi, Radiana, Tulus, H. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Kristen Bukit Pengharapan Kabupaten Sanggau Damianus Budi Prasetya, Usman Radiana, Tulus Junanto, Helaria Mening. *Multiverse*, 1(2), 51–58.
- Dan, P., Peringkat, E., & Pengusul, I. (2021). LAPORAN EVALUASI KINERJA AKREDITASI PROGRAM STUDI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM JAM ' IYAH MAHMUDIYAH (STAI-JM) TANJUNG PURA - LANGKAT TAHUN 2021.
- Darmaji, Supriyanto, A., Timan, A., & Amirul Adha, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di SD Plus Al-Kautsar Malang). *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 5(2), 172–186.
- Febriani, E., Syaifuddin, M., & Syafaruddin. (2023). Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 114–120. <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JIEE/article/view/65#>
- Gustini, N., & Mauliy, Y. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 4(2), 229–244. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.5695>
- Hamdi, S., Setiawan, R., & Musyadad, F. (2020). Evaluation of the implementation of Indonesia Pintar program in vocational school. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 24(1), 102–115. <https://doi.org/10.21831/pep.v24i1.32603>
- Hamidah, L., Siregar, S., & Nuraini, N. (2019). Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Buya Hamka. *Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2), 135. <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v8i2.2668>
- Hully, Rahman, Ahmad Zikri, Irwan, Sawaluddin, Achmad Ghozali Syafii, Y. (2023). Internalizing Religious Moderation Values Into The Islamic Education At University. *Journal of Namibian Studies*, 1(34), 1122–1138.
- Imami, B., & Hariyati, N. (2021). Masyarakat Bagi Penyediaan Kebutuhan Informasi Pendidikan Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(03), 749–763.
- Mubarok, H., & Apriani, N. (2022). Kemampuan Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(1), 27–36.
- Musa, F., & Sawaluddin. (2020). Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI : Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. *Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 14–26.
- Rahminawati, N. (2021). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar. *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(3), 212–219. <https://doi.org/10.17977/um027v4i32021p212>

- Rahwati, D. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 14–24.
- Risal Sammara, H. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 45–58.
- Rohman, M., Kurikulum, P., & Islam, P. (2015). *PROBLEMATIKA KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM* Mujibur Rohman 1. 1–15.
- Saihu, M., & Siregar, S. (2022). Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship (Studi Pada Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 471–482.
- Sawaluddin, Koisyahbudin, Imran Rido, S. R. (2022). Creativity on Student Learning Outcomes in Al-Quran Hadith Subjects. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(2), 257–263. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v3i2.106>
- Sawaluddin. (2021). Evaluasi Pembelajaran Terintegrasi. *Journal of Islamic Education El Madani*, 1(1), 43–55. <https://doi.org/10.55438/jiee.v1i1.15>
- Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1775](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775)
- Sulastri, T. (2020). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*, 5(2), 53–60. <https://doi.org/10.51729/5211>
- Sunarti, N. (2023). Pembinaan Pengawas terhadap Kemampuan Tugas Kewirausahaan Kepala Madrasah Tingkat Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 101–113.
- Sutikno, T. A. (2017). Studi produktivitas kerja guru pada sekolah menengah kejuruan negeri di malang raya. *Teknologi Dan Kejuruan*, 34(1), 1–12. <https://core.ac.uk/download/pdf/296297060.pdf>
- Suwandi. (2021). Analisis Data Research dan Development Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 1(1), 43–55.
- Wahyuni, A., Effendi, L. A., Angraini, L. M., & Andrian, D. (2020). Developing instrument to increase students' geometry ability based on Van Hiele level integrated with Riau Malay culture. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 24(2), 208–217. <https://doi.org/10.21831/pep.v24i2.33811>